

KETIDAKADILAN SOSIAL PADA TOKOH EKSIL POLITIK DALAM NOVEL-NOVEL LEILA S. CHUDORI (TEORI RELASI KUASA MICHEL FOUCAULT)

M. Maulidil Zidni Ilma

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

Email: mmaulidil.22115@mhs.unesa.ac.id

Parmin

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

Email: parmin@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidakadilan sosial pada tokoh eksil politik dalam novel *Pulang* dan *Namaku Alam* karya Leila S. Chudori menggunakan pendekatan mimetik. Jenis penelitian yang digunakan merupakan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian yang digunakan merupakan novel *Pulang* dan *Namaku Alam* karya. Data penelitian yang digunakan berupa kutipan dialog dan narasi yang menggambarkan ketidakadilan sosial tokoh eksil politik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mencatat secara intensif isi novel. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan teori relasi kuasa Michel Foucault. Hasil penelitian ditemukan tiga bentuk relasi kuasa yaitu, relasi kuasa atas pikiran, relasi kuasa atas tubuh, dan resistensi kekuasaan. (1) Relasi kuasa atas pikiran tampak melalui propaganda, stigma sosial, dan pengawasan yang membentuk kepatuhan masyarakat. (2) Relasi kuasa atas tubuh terlihat melalui intimidasi, interogasi, kekerasan fisik, dan kontrol terhadap kehidupan tokoh. Sementara itu, (3) resistensi kekuasaan diwujudkan melalui upaya tokoh menjaga ingatan sejarah, menuliskan kembali sejarah yang dihapus negara, dan mempertahankan identitas dan kemanusiaan mereka. Dengan demikian, kedua novel karya Chudori diperlihatkan praktik kekuasaan Orde Baru yang tidak hanya dilakukan melalui tekanan fisik, tetapi pengaruh terhadap pola pikir dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui penggambaran tokoh yang terdapat dalam novel, terlihat bahwa kekuasaan dapat dijalankan melalui berbagai bentuk pengendalian seperti pembatasan kebebasan dan pembentukan cara pandang masyarakat.

Kata Kunci: kekuasaan, ketidakadilan sosial, relasi kuasa.

Abstract

*This study aims to analyze social injustice experienced by political exile characters in the novels *Pulang* and *Namaku Alam* by Leila S. Chudori using a mimetic approach. This research employs a descriptive qualitative method. The data sources used in this study are the novels *Pulang* and *Namaku Alam*. The research data consist of dialogue and narrative excerpts that depict social injustice experienced by political exile characters. Data collection techniques were carried out through intensive reading and note-taking of the contents of the novels. The data analysis technique was conducted based on Michel Foucault's theory of power relations. The results of the study reveal three forms of power relations, namely power relations over the mind, power relations over the body, and resistance to power. (1) Power relations over the mind are reflected through propaganda, social stigma, and surveillance that shape fear and public obedience. (2) Power relations over the body are demonstrated through intimidation, interrogation, physical violence, and control over the characters' lives. Meanwhile, (3) resistance to power is manifested through the characters' efforts to preserve historical memories, rewrite histories that have been erased by the state, and maintain their identity and humanity. Thus, the two novels by Chudori illustrate the practice of New Order power, which was not only carried out through physical pressure but also through its influence on social life and patterns of thought within society. Through the portrayal of characters in the novels, it can be seen that power operates through various forms of control, such as restricting freedom and shaping society's perspectives.*

Keywords: power, power relations, social injustice

PENDAHULUAN

Peristiwa politik tahun 1965 menjadi bagian penting sejarah Indonesia yang meninggalkan berbagai persoalan sosial, politik, dan kemanusiaan. Pergolakan politik yang dikenal sebagai peristiwa G30S/PKI 1965, pasca-peristiwa tersebut melahirkan pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Peralihan kekuasaan menuju pemerintahan Orde Baru mengakibatkan masyarakat terdampak oleh berbagai kebijakan yang diterapkan, termasuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kesulitan untuk kembali ke tanah air dialami oleh sebagian warga negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan, maupun bekerja di luar negeri akibat tuduhan sebagai pengkhianat negara karena keterkaitan mereka dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dilansir dari berita *BBC News Indonesia* (2023), “Jumlah eksil yang masih hidup diperkirakan lebih dari 100 orang, sebagian besar tinggal di Belanda, sekitar 68 orang”. (BBC News, 2023). Fenomena tersebut tercermin dalam karya sastra melalui penggambaran berbagai ketidakadilan sosial yang dialami tokoh eksil politik. Salah satu karya sastra yang mengangkat isu peristiwa politik pasca-1965 merupakan novel karya Leila S. Chudori berjudul *Pulang dan Namaku Alam*.

Pasca-peristiwa G30S/PKI menjadi latar utama dalam kedua novel *Pulang* karya Chudori yang digambarkan dampak politik terhadap kehidupan tokoh eksil. Novel ini diceritakan tentang tokoh Dimas Suryo, Nugroho Dewantoro, Risjaf, dan Tjahjadi yang terpaksa hidup di luar negeri karena dicurigai memiliki hubungan dengan PKI karena keterlibatan mereka dengan kantor berita nusantara. Pencabutan paspor membuat mereka kehilangan status kewarganegaraan dan menjadi eksil politik di Prancis. Kehidupan Dimas dan keluarga juga digambarkan mengalami tekanan akibat pengawasan dan intimidasi rezim Orde Baru hingga putri Dimas yaitu, Lintang Utara kembali ke Indonesia pada 1998 untuk merekam pengalaman keluarga korban tragedi 1965.

Novel *Namaku Alam* yang menjadi *spin off* dari *Pulang* melanjutkan kisah keluarga eksil politik melalui tokoh Segara Alam, anak Hananto Prawiro yang dituduh terlibat dengan Lekra, kemudian dieksekusi oleh pemerintah Orde Baru. Setelah kehilangan ayahnya, Alam bersama ibu dan saudara-saudaranya harus menghadapi stigma sebagai keluarga pengkhianat negara hingga mengalami diskriminasi dan pengawasan karena dianggap tidak bersih lingkungan. Melalui kegiatan Para Pencatat Sejarah, Alam berusaha memahami masa lalu ayahnya dan mengungkap sejarah yang selama ini dihapus oleh negara. Novel karya Chudori bukan sekadar fiksi melainkan representasi tentang peristiwa kelam yang terjadi di Indonesia. Fenomena tokoh eksil politik yang digambarkan dalam

novel dicerminkan sebagai realitas pahit yang dialami oleh ribuan masyarakat Indonesia pasca peristiwa 1965 tersebut. Novel *Pulang* dan *Namaku Alam* merupakan karya sastra yang menarik untuk dianalisis dalam teori relasi kuasa. Ketidakadilan sosial yang dialami tokoh dalam kedua novel sangat kompleks meliputi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), marginalisasi, kekerasan fisik, dan dominasi kekuasaan terhadap individu maupun kelompok. Situasi ini sejalan dengan teori relasi kuasa Michel Foucault yang terbagi menjadi 3 bentuk yaitu, relasi kuasa atas pikiran, relasi kuasa atas tubuh, dan resistensi kekuasaan

Menurut Foucault (2017), kekuasaan memiliki kekuatan yang melampaui segala hal, menciptakan realitas yang jelas bahwa kekuasaan dapat mengarahkan individu untuk tunduk pada kekuasaan. Pengetahuan, diskursus, dan kebenaran adalah mekanisme kekuasaan atas pikiran. bentuk kekuasaan atas pikiran tidak beroperasi melalui tindakan represif, melainkan pembentukan cara berpikir, sistem pengetahuan, dan definisi kebenaran. Penyelenggara kekuasaan akan selalu memproduksi pengetahuan yang baru sebagai basis kekuasaannya. Menurut Foucault (dalam Jones dkk., 2016) masyarakat modern memiliki dua alasan yang mendasari bentuk relasi kuasa atas tubuh yaitu kebutuhan kapitalisme industri dan peningkatan tekanan penduduk. Ia menjelaskan bagaimana institusi—seperti sekolah, rumah sakit, dan penjara menggunakan serangkaian teknik disipliner untuk membentuk tubuh sehingga patuh dan berguna bagi kebutuhan kekuasaan modern. Gerak, posisi, dan ritme tubuh diatur melalui jadwal, pengawasan, dan latihan berulang. Foucault melihat kekuasaan dengan cara yang berbeda dari pemahaman umum. kekuasaan bukan hanya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk menekan pihak lain, tetapi merupakan hubungan yang terjadi melalui berbagai praktik dalam kehidupan sehari-hari.

Kekuasaan dapat bekerja melalui berbagai cara, seperti aturan, pengetahuan, wacana, maupun lembaga tertentu, sehingga seseorang dapat memengaruhi atau mengendalikan orang lain tanpa harus menggunakan kekerasan secara langsung. Dalam pandangan Foucault, kekuasaan lebih sering berjalan melalui proses hegemoni, yaitu ketika pengaruh atau kendali diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar oleh pihak yang dikuasai. Dalam konteks eksil politik pada novel *Pulang* dan *Namaku Alam* rezim Orde Baru berhasil menciptakan wacana yang mengategorikan para eksil politik sebagai pengkhianat negara, komunis, dan tidak bersih lingkungan. Hal ini sesuai dengan bentuk relasi kuasa atas pikiran, yaitu kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui kekerasan atau paksaan, tetapi juga melalui pembentukan pengetahuan dan wacana.

Penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yaitu pertama dilakukan oleh Pradipta (2014) berjudul “Konflik Politik dalam Novel *Pulang* Karya Leila S. Chudori”. Penelitian tersebut dikaji konflik politik dalam novel *Pulang* menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan menemukan bentuk pertempuran maupun strategi politik dalam cerita. Kedua, penelitian Ardiono dkk., (2019) tentang ketidakadilan sosial dalam novel *Pulang* karya Leila S. Chudori melalui tinjauan sosiologi sastra yang menemukan lima bentuk ketidakadilan, yaitu stereotip, marginalisasi, subordinasi, dominasi Orde Baru, dan pelanggaran HAM. Ketiga, penelitian Sholikhah (2020) berjudul “Relasi dan Resistensi Kuasa dalam Novel *Orang-Orang Oetimu* Karya Felix K. Nesi” yang mengkaji bentuk relasi kuasa atas pikiran, tubuh, dan resistensi terhadap kekuasaan dominan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori dan sumber data yang digunakan. Penelitian saat ini menggunakan teori relasi kuasa dengan menganalisis novel *Pulang* dan *Namaku Alam* karya Leila S. Chudori. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketidakadilan sosial yang dialami tokoh eksil politik melalui teori relasi kuasa Foucault.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan mimetik yang berfokus pada teori relasi kuasa Michel Foucault. Menurut Parmin (2016) pendekatan dalam penelitian sastra menjadi landasan dasar peneliti untuk menentukan pemilihan teori, metode, dan sudut pandang yang digunakan untuk mengkaji objek yang diteliti. Pendekatan mimetik dipilih karena peristiwa ketidakadilan sosial yang terjadi pada tokoh eksil politik dalam novel *Pulang* dan *Namaku Alam* merupakan cerminan peristiwa nyata yang terjadi di Indonesia. Menurut Abrams (dalam Rahmawati dkk., 2022), kritik mimetik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai representasi atau tiruan realitas kehidupan. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel *Pulang* dan *Namaku Alam* karya Leila S. Chudori yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Novel *Pulang* diterbitkan pada 2012 dengan jumlah 461 halaman, sedangkan novel *Namaku Alam* diterbitkan pada 2023 dengan jumlah 438 halaman.

Sumber data penelitian berupa kutipan kalimat dan paragraf yang ditunjukkan ketidakadilan sosial pada tokoh eksil politik dalam kedua novel. Fokus penelitian diarahkan pada teks yang mencerminkan relasi kuasa dan ketidakadilan sosial yang dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat pada masa Orde Baru. Data utama diperoleh dari narasi dan interaksi tokoh dalam novel *Pulang* dan *Namaku Alam*; sedangkan artikel, buku, berita,

dan dokumen lain digunakan sebagai data mimetik atau data realitas untuk membandingkan representasi peristiwa dalam novel dengan kenyataan sosial di masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik baca dan catat. Teknik baca dilakukan dengan membaca kedua novel *Pulang* dan *Namaku Alam* secara menyeluruh dan berulang untuk memahami narasi, dialog, peristiwa yang digambarkan sebagai ketidakadilan sosial tokoh eksil politik berdasarkan teori relasi kuasa. Selama proses membaca peneliti juga menerapkan teknik catat untuk mengumpulkan data yang sesuai. Data kemudian dicatat melai bentuk kutipan langsung, mencakup dialog, kalimat dan paragraf yang secara eksplisit atau implisit ditunjukkan ketidakadilan sosial dalam perspektif relasi kuasa.

Langkah-langkah Pengumpulan Data:

- 1) Membaca keseluruhan kedua isi novel *Pulang* dan *Namaku Alam* untuk memperoleh pemahaman terhadap isi cerita, terutama yang berhubungan dengan ketidakadilan sosial tokoh eksil politik.
- 2) Memberi kode yang sesuai dengan konsep dan rumusan masalah pada sumber data sehingga memudahkan pengelompokan.
- 3) Mencatat kutipan-kutipan langsung dari teks yang ditunjukkan hubungan bentuk ketidakadilan sosial tokoh eksil politik dan memasukkannya ke dalam tabel klasifikasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Analisis isi dilakukan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap makna dalam teks (Sumarno, 2020). Data berupa kutipan, dialog, dan narasi dalam novel dianalisis untuk mengkaji penggambaran ketidakadilan sosial tokoh eksil politik berdasarkan teori relasi kuasa Michel Foucault yang meliputi relasi kuasa atas pikiran, tubuh, dan resistensi terhadap kekuasaan. Selanjutnya, data diklasifikasikan dan ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk-bentuk relasi kuasa yang direpresentasikan dalam novel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini akan dibahas analisis ketidakadilan sosial yang dialami tokoh-tokoh dalam novel *Pulang* dan *Namaku Alam* karya Leila S. Chudori menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault. Analisis ini bertujuan ditunjukkan berbagai bentuk relasi kuasa yang meliputi relasi kuasa atas pikiran, relasi kuasa atas tubuh, dan resistensi terhadap kekuasaan. Pembahasan difokuskan pada cara kekuasaan bekerja dalam kehidupan tokoh dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan kebebasan individu. Selain itu, analisis ini juga menelaah berbagai bentuk perlawanan yang muncul sebagai respons terhadap praktik-praktik kekuasaan yang menimbulkan

ketidakadilan sosial sehingga, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai gambaran ketidakadilan sosial yang direpresentasikan dalam kedua novel tersebut.

1) Relasi Kuasa Atas Pikiran

Relasi kuasa atas pikiran terlihat dalam novel *Pulang* dan *Namaku Alam* melalui tokoh-tokoh yang mengalami pembentukan cara berpikir akibat dari kondisi politik yang bergejolak pasca-peristiwa G30S/PKI. Kekuasaan tidak hanya hadir melalui tindakan fisik, tetapi bekerja secara halus membentuk rasa takut, stigma, dan pengendalian informasi. Tokoh-tokoh yang dianggap memiliki keterikatan dengan peristiwa politik atau mereka yang tetap setia pada orde lama dipaksa menerima stempel sosial yang melekat pada diri mereka. Hal tersebut ditemukan pada data dalam novel *Pulang*, sebagai berikut.

Data 01

Anggota partai komunis, keluarga partai komunis atau mereka yang dianggap simpatisan komunis diburu habis-habisan. Bukan hanya di tangkap, tapi terjadi eksekusi secara besar-besaran di seantero Indonesia. Berita-berita ini muncul seperti sketsa-sketsa yang digambarkan oleh muncrat darah. Secara serentak kami disergap insomnia berkepanjangan. (Chudori, 2012: 72).

Data tersebut ditunjukkan relasi kuasa atas pikiran, yakni kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan melainkan melalui wacana, rasa takut, tekanan psikologis, dan pembentukan trauma terhadap masyarakat. Kalimat “secara serentak kami disergap *imsomnia* berkepanjangan” diperlihatkan dampak kekuasaan terhadap psikologi dan pikiran para tokoh. Hidup dalam kecemasan, rasa takut terus-menerus dan selalu dibayangi ancaman. Penyebaran berita mengenai eksekusi besar-besaran menjadi bentuk alat kekuasaan melalui penguasaan wacana. Informasi yang beredar mampu membangun rasa cemas sehingga kekuasaan berhasil memengaruhi kesadaran tokoh dan membentuk pola pikir yang dipenuhi trauma maupun kecemasan.

Selaras dengan fakta sejarah yang ditemukan, melalui wawancara *BBC News Indonesia* (2023), dengan salah satu pasangan suami istri yang menjadi korban eksil politik pasca-peristiwa 1965 di Belanda adalah Siti Krinowati dan sungkono. Krinowati mengungkapkan, “Ibu dan bapak banyak kenalan, misalnya Pak Surjardarma memberitahu ibu, Jeng cepat tinggalkan sini, karena situasinya semakin gawat. Di sana sini banyak orang ditangkapi dan sebagainya”. (Bonasir, 2023). Fakta sejarah tersebut menjadi peringatan bagi Wati yang saat itu berusia 17 tahun untuk segera meninggalkan Indonesia di tengah situasi politik dan keamanan yang semakin

memburuk. Penangkapan orang-orang yang diduga berafiliasi dengan partai komunis menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian di masyarakat, membuat mereka takut berbicara bahkan di lingkungan sosial mereka sendiri. Kondisi ini sejalan dengan gagasan Michel Foucault bahwa kekuasaan bekerja bukan hanya melalui paksaan langsung, melainkan juga melalui pembentukan kesadaran dan kontrol atas cara berpikir masyarakat.

Bentuk relasi kuasa atas pikiran selanjutnya terlihat pada novel *Namaku Alam* ketika tokoh Segara Alam masih duduk di bangku SMA yang saat itu tengah mengikuti mata pelajaran sejarah Indonesia. Ibu Uma sebagai guru sejarah sering mengajak para siswanya untuk berdiskusi berbagai sudut pandang bagaimana sejarah dinarasikan, bukan hanya versi resmi yang terdapat pada buku pelajaran. Dalam diskusi tersebut diperlihatkan bagaimana sejarah dapat dipengaruhi dan diolah oleh kepentingan pihak yang memiliki kekuasaan. Para siswa menyadari bahwa fakta sejarah tidak selalu bersifat netral. Hal tersebut terlihat dalam data novel *Namaku Alam*, sebagai berikut.

Data 02

“Problemnya adalah, siapa pun yang berkuasa saat itu akan menyeleksi, memilah-milah fakta-fakta dan peristiwa, dan tak jarang ada yang menghapus atau melebih-lebihkan fakta-fakta atau peran seseorang di dalam sebuah peristiwa”. (Chudori, 2023: 12).

Data tersebut ditunjukkan relasi kuasa atas pikiran karena diperlihatkan pihak yang memiliki kekuasaan dapat mengubah cara masyarakat memahami sejarah. Dalam kutipan tersebut di jelaskan bahwa penguasa dapat menyeleksi dan memilah fakta peristiwa sehingga masyarakat tidak memperoleh pemahaman sejarah secara utuh, melainkan hanya versi yang telah dikonstruksi oleh pihak yang berkuasa. Temuan ini sejalan dengan kesaksian yang dimuat oleh BBC News Indonesia (2023) melalui wawancara dengan korban eksil di Belanda, David Hill. Dalam wawancara tersebut, David Hill mengungkapkan bahwa narasi sejarah yang dibentuk pada masa pemerintahan Soeharto masih menjadi perdebatan hingga saat ini.

Apa yang terjadi sebenarnya, dan mengapa sejarah itu diputarbalikkan, diubah menjadi satu mitos mengenai gerakan PKI. Jadi saya kira satu faktor yang sampai sekarang ini masih menyakiti hati mereka ialah betapa besar pembohongan yang masih ada dalam buku-buku sejarah di Indonesia mengenai peranan PKI. (Bonasir, 2023)

Data tersebut dijelaskan bahwa David Hill menyoroti dugaan perubahan narasi sejarah mengenai peristiwa

gerakan PKI 1965 yang terus diwariskan dalam buku-buku sejarah di Indonesia. Narasi tersebut dapat membentuk pola pikir masyarakat secara kolektif sehingga muncul pelabelan buruk yang bertahan dalam waktu yang lama. Akibat narasi sejarah yang diubah, tokoh eksil politik tersebut tidak hanya kehilangan kebebasan sosial, tetapi harus hidup dengan cap negatif yang dibangun oleh narasi resmi negara yang dilegitimasi melalui pendidikan maupun media.

Data relasi kuasa atas pikiran selanjutnya ditemukan pada novel *Pulang* melalui tokoh Lintang, anak dari Dimas Suryo yang tengah mengerjakan proyek film dokumenter tentang peristiwa 1965. Meski terpaksa menetap di Prancis akibat status dimas sebagai buronan politik, Lintang tetap berusaha mengumpulkan bukti pembantaian melalui surat-surat dan dokumen dari keluarga dan rekan-rekan ayahnya di Indonesia. Dari berbagai sumber tersebut, ia menyadari bahwa banyak orang yang tidak bersalah justru menjadi korban pembunuhan pasca-peristiwa 1965. Hal tersebut ditemukan dalam novel *Pulang*, sebagai berikut.

Data 03

“Pembantaian yang terjadi terus-menerus di berbagai bagian Indonesia, perburuan terhadap anggota komunis atau keluarganya adalah sebuah pengukuhan untuk kekuasaan yang kekal, yang kuat, dan abadi. (Chudori, 2012: 254)

Data tersebut ditunjukkan relasi kuasa atas pikiran, di mana penguasa melanggengkan dominasinya melalui penciptaan rasa takut. Melalui tokoh Lintang, tampak bahwa sejarah yang ia kenal lewat surat-surat ternyata menyimpan banyak luka. Meski lahir dan besar di Prancis, bayang-bayang peristiwa G30S/PKI tetap memengaruhi kehidupannya, membuktikan bahwa kekuasaan tidak berhenti pada generasi yang mengalami peristiwa tersebut secara langsung, melainkan terus mewariskan trauma dan narasi sejarah kepada generasi berikutnya. Pembantaian yang terjadi pun bukan sekadar kekerasan fisik, tetapi juga bentuk pendisiplinan yang membentuk cara individu berpikir dan bertindak. Hal tersebut selaras dengan kondisi sosial yang ditemukan sebagai berikut.

Di Pulau Bali diyakini ada banyak kuburan massal pembantaian orang-orang yang dicap komunis pada 1965–1966. Tapi masalah ini tidak pernah diselidiki dan diteliti secara resmi. Negara melupakannya dan kebanyakan masyarakat memilih bungkam. BBC News Indonesia mendatangi situs-situs kuburan massal di Bali dan mewawancarai korban, saksi dan pelaku. (Affan, 2024).

Data tersebut ditunjukkan ketegasan pemerintah Orde Baru dalam menghadapi pihak-pihak yang dianggap

mengancam stabilitas rezim. Hal ini diperkuat oleh wawancara *BBC News Indonesia* (2024) dengan Mustawi, saksi langsung pembantaian di Bali yang menyatakan bahwa pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh anggota PKI merupakan tindakan yang tidak masuk akal. Jeritan korban yang disiksa dan suara truk militer yang mengangkut mayat meninggalkan trauma mendalam.

Realitas ini digambarkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui mekanisme kontrol sosial, di mana masyarakat yang menyaksikan kelompok tidak bersalah pun ikut menjadi korban akhirnya terdorong untuk mengatur diri sendiri. Rasa takut yang tercipta melahirkan kepatuhan kolektif tanpa harus selalu mengandalkan kekerasan langsung, sehingga relasi kuasa atas pikiran tampak jelas dari cara kekuasaan menanamkan kewaspadaan yang perlahan membentuk pola pikir dan tindakan masyarakat.

Data 04

“Peristiwa yang tak akan kulupakan adalah ketika kali pertama aku mendengar Irwan menyebut-nyebut Bapak sebagai pengkhianat negara.” (Chudori, 2023: 37).

Data tersebut ditunjukkan relasi kuasa atas pikiran, ketika kekuasaan membentuk cara pandang masyarakat terhadap orang lain melalui stigma sosial. Tokoh Segara Alam merasa terluka saat ayahnya disebut pengkhianat negara, sebab label tersebut bukan sekadar ucapan, melainkan hasil narasi politik yang telah lama dibangun. Orang-orang yang terduga terkait peristiwa 1965 langsung dicap buruk tanpa pemahaman atas fakta yang sebenarnya dan dampak turut dirasakan oleh anak-anak maupun keluarga para korban. Temuan ini selaras dengan kesaksian Ning atau Sri Budiarti yang mengungkapkan, “Kalau saya salah tingkah, mereka bilang ‘Dasar Gerwani’”. Tahun 2015 saya masih dimaki ‘Dasar tante ini Gerwani’ hanya karena saya berbeda pikiran”. (Niam & Setuningsih, 2023). Realitas sosial tersebut ditunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu hadir melalui kekerasan fisik, tetapi juga melalui bahasa dan stigma sosial yang diwariskan dalam masyarakat.

Ning atau Sri Budiarti mengungkapkan bahwa ia dimaki dengan kata-kata “Gerwani” ketika beradu argumen dengan seorang tetangga. Relasi kuasa atas pikiran terlihat ketika masyarakat tanpa sadar terus menggunakan stigma tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang memiliki pendapat berbeda memilih berhati-hati dalam berbicara agar terhindar dari cap negatif. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat melalui bahasa, stigma, dan pengendalian informasi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

2) Relasi Kuasa Atas Tubuh

Relasi kuasa atas tubuh dalam novel *Pulang* dan *Namaku Alam* dapat dilihat dari berbagai bentuk pengendalian dan tindakan represif yang dialami para tokoh akibat situasi politik pada masa pemerintahan Orde Baru. Dalam kedua novel, tubuh tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi juga menjadi alat kekuasaan untuk ditunjukkan dominasinya. Dalam novel *Pulang*, kondisi tersebut terlihat melalui tokoh Sumarno yang dijuluki sebagai “telunjuk”. Julukan tersebut digambarkan sebagai orang yang ditunjukkan siapa saja yang pantas untuk dieksekusi aparat negara. Hal tersebut ditemukan dalam novel *Pulang*, sebagai berikut.

Data 01

“Ternyata instingku tepat. Sumarno memang dahulu adalah kawan Dimas yang kini dijuluki Telunjuk, seseorang yang menunjuk siapa-siapa yang layak disapu tentara”. (Chudori, 2012: 221).

Data tersebut termasuk dalam relasi kuasa atas tubuh karena ditunjukkan bagaimana tubuh para tokoh eksil politik menjadi sasaran langsung kekuasaan Orde Baru. Melalui aparat negara sebagai instrumen kekuasaan, rezim menentukan siapa saja yang dianggap layak untuk ditangkap, diburu, atau dieksekusi. Kondisi tersebut ditunjukkan bahwa para tokoh eksil politik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, tetap menjadi target pengawasan dan perburuan apabila dianggap memiliki keterkaitan dengan kelompok yang dipandang mengancam keberlangsungan rezim pada saat itu. Situasi seperti ini membuat kehidupan para tokoh eksil politik hidup dalam rasa takut, bahkan kehilangan nyawa hanya karena ditunjuk oleh orang lain. Temuan dalam novel tersebut sejalan dengan informasi yang dimuat oleh media daring *Historia* (2018) sebagaimana terlihat pada kutipan berikut.

Setelah peristiwa G30S, kelompok-kelompok antikomunis melakukan konsolidasi kekuatan. Angkatan Darat bergerak cepat. Selain terlibat langsung menumpas orang-orang PKI, mereka pun bekerja sama dan memfasilitasi kekuatan-kekuatan anti-PKI, salah satunya DI/TI. (Jo, 2018).

Temuan data pada pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa pasca-peristiwa 1965, Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) secara cepat melakukan penumpasan terhadap orang-orang terduga PKI. Melalui prosesnya, tentara juga bekerja sama dengan aliansi antikomunis seperti DI/TII untuk memburu mereka yang dicurigai anggota, maupun simpatisan PKI. Pemberitaan *Historia* (2018) menyebut kelompok tersebut ikut membantu mengungkap persembunyian orang yang dianggap dekat dengan PKI

dan rezim Soekarno. Hal ini ditunjukkan bahwa penumpasan tidak hanya dilakukan oleh militer negara, tetapi juga melibatkan kelompok lain masyarakat.

Sejalan dengan Foucault, kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk aturan resmi, melainkan dapat menyebar melalui banyak pihak yang saling mendukung. Tentara, kelompok antikomunis, hingga masyarakat sipil sama-sama menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan untuk mengawasi dan mengendalikan individu. Pembatasan hak hidup tokoh eksil politik tidak hanya melalui perburuan, penangkapan, dan pembantaian, melainkan dengan tekanan ekonomi. Hal tersebut ditemukan dalam novel *Pulang*, sebagai berikut.

Data 02

“Ketika kebijakan Bersih Diri dan Bersih Lingkungan diluncurkan pemerintah tahun 1981, yang berarti siapa pun yang ingin menjadi Pegawai Negeri atau memegang jabatan strategis harus melalui proses penelitian khusus”. (Chudori, 2012: 332).

Dalam novel *Pulang*, Chudori tidak hanya digambarkan tentang kehidupan para eksil politik di luar negeri, tetapi juga diperlihatkan dampak panjang peristiwa 1965 terhadap keluarga Aji Suryo yang tetap tinggal di Indonesia. Keluarga mereka harus hidup dengan stigma dan cap politik yang terus melekat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuknya terlihat ketika pemerintah menerapkan kebijakan Bersih Diri dan Bersih Lingkungan yang mewajibkan penelitian khusus bagi orang-orang yang ingin menjadi pegawai negeri atau menduduki jabatan strategis. Akibat kebijakan tersebut, para eksil politik maupun keluarga mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan hidup yang layak.

Siapa pun yang ingin menjadi PNS atau ingin menjadi pejabat negara harus melalui screening oleh aparat militer untuk memastikan bahwa ia tidak terkait dengan PKI maupun organisasi sayap kiri. Banyak anggota keluarga atau keturunan komunis kehilangan hak mereka sebagai warga negara. (Pribadi, 2018).

Kekuasaan Soeharto pada masa Orde Baru tidak berhenti pada penangkapan, perburuan, pengasingan, hingga pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga terkait PKI, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan masa depan keluarga mereka. Melalui proses screening oleh aparat militer, negara menentukan siapa yang dianggap layak menjadi pegawai negeri atau menduduki jabatan tertentu. Akibat screening yang dilakukan aparat negara, banyak keluarga dan keturunan yang dicap

memiliki hubungan dengan PKI kehilangan hak kesempatan yang sama sebagai warga negara, terutama dalam memperoleh pekerjaan dan posisi sosial di masyarakat. Kondisi tersebut memiliki kesamaan dengan novel *Pulang* ketika keluarga Aji Suryo dan para eksil politik mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan akibat stigma politik yang terus melekat pada diri mereka.

Data 03

“Tetapi kawan-kawan di Havana mengatakan segala macam hubungan dan koneksi ke Indonesia bisa membuat keluarga kami semakin diburu tentara. Lalu jatuhlah bom berikutnya paspor Indonesia kami dicabut”. (Chudori, 2012: 37).

Data 04

Tentu saja sejarah mencatat, Om Dimas, Om Nugroho, dan kawan-kawan sejawatnya terjebak di sana dan akhirnya tak pernah bisa pulang ke Indonesia karena paspor mereka dicabut dan dianggap sebagai bagian dari Tragedi September. (Chudori, 2023: 153).

Data dalam novel *Pulang* dan *Namaku Alam* tersebut ditunjukkan sebagai ambisi pemerintahan Orde Baru ingin menumpas sampai akar bagi mereka yang terikat dengan peristiwa 1965 tersebut. Data tersebut ditunjukkan bagaimana keempat tokoh eksil politik dalam novel *Pulang* dicabut paspornya yang membuat mereka tidak bisa kembali ke negaranya sendiri. Kondisi ini membuat para eksil politik hidup dalam keterasingan di luar negeri dan tidak memiliki kepastian tentang masa depan mereka. dengan begitu kekuasaan tidak hanya hadir lewat berbagi macam kekerasan, melainkan juga melalui pencabutan identitas kewarganegaraan yang membuat individu kehilangan hak untuk bergerak bebas.

Negara menggunakan identitas politik sebagai alat untuk mengontrol kehidupan individu sehingga tubuh mereka tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh rezim seperti, kutipan dalam novel *Namaku Alam* sebagai berikut.

Data 05

“Hampir setiap pekan, rumah kami disatroni dan diobrak-abrik aparat yang bertanya lokasi Bapak. Mereka bukan bertanya tetapi membentak-bentak Ibu dengan suara menggelegar. (Chudori, 2023: 154).

Data tersebut ditunjukkan adanya kontrol tubuh yang dilakukan secara terus-menerus oleh kekuasaan. Melalui aparat negara, pemerintah menggunakan kekuasaan untuk melakukan intimidasi, penggerebekan, ancaman terhadap tubuh dan ruang hidup masyarakat. Tindakan mengobrak-abrik rumah dan membentak ibu dari Segara Alam ditunjukkan adanya kontrol fisik dan psikologis yang

membuat individu merasa cemas dan tidak bebas. Dengan demikian, data tersebut diperlihatkan bagaimana tubuh dan kehidupan masyarakat menjadi sasaran kontrol tubuh melalui aparat demi melanggengkan kekuasaan.

Saat itu, mereka diusir dari tanahnya lantaran dituduh terlibat PKI atau *underbouwnya*. Sejak saat itu, mereka mengungsi dan kini mendirikan rumah di tanah milik tetangga atau saudaranya.

Termasuk saya, keluarga saya diusir. Tapi kemudian bapak saya prihatin. Beli tanah 50 ubin dan sekarang ditinggali, kata Ketua Kelompok Cinta Tani, Karsiman, beberapa waktu lalu. (Ridlo, 2020).

Data tersebut ditunjukkan adanya tindakan represif terhadap masyarakat pasca-peristiwa 1965, khususnya kepada orang-orang yang dituduh terlibat PKI maupun organisasi yang berkaitan dengannya. Pengusiran warga dari tanah miliknya sendiri diperlihatkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja dalam bentuk pengawasan, tetapi juga melalui perampasan hak hidup dan tempat tinggal. Tuduhan sebagai anggota PKI dijadikan alasan untuk menyingkirkan masyarakat tertentu sehingga mereka kehilangan rasa aman dan harus hidup berpindah atau menumpang di tanah milik kerabat maupun tetangga.

Data dalam novel maupun fakta sejarah sama-sama diperlihatkan adanya tekanan dari aparat atau pihak yang berkuasa terhadap keluarga yang dicurigai memiliki hubungan dengan PKI. Pada kutipan sebelumnya, tekanan dilakukan melalui penggerebekan rumah dan intimidasi terhadap keluarga korban, sedangkan pada fakta sejarah tindakan tersebut terlihat dalam bentuk pengusiran dari tempat tinggal. Kedua data itu ditunjukkan bahwa kekuasaan negara telah menjangkau kehidupan pribadi masyarakat dan menciptakan ketakutan sebagai cara untuk mempertahankan dominasi politik pada masa Orde Baru.

3) Resistensi Kekuasaan

Resistensi kekuasaan lahir dari tekanan, dominasi dan kontrol kekuasaan terhadap individu maupun kelompok. Ketika kekuasaan berusaha mengatur, membatasi atau menindas kehidupan seseorang, maka akan muncul bentuk perlawanan sebagai respons terhadap kondisi tersebut. Oleh karena itu, Michel foucault menyebut di mana ada kekuasaan, juga selalu ada resistensi. Dalam novel *Pulang* dan *Namaku Alam*, resistensi hadir melalui tokoh-tokoh yang tetap mencari kebenaran sejarah, menolak lupa peristiwa 1965, dan menyuarakan pengalaman korban.

Melalui tokoh Lintang, anak dari seorang eksil politik yang ayahnya tidak bisa kembali ke Indonesia akibat pencabutan paspor oleh pemerintah Orde Baru, novel *Pulang* ditunjukkan bahwa dampak pasca-peristiwa 1965

masih dirasakan hingga generasi berikutnya. Lintang tumbuh dengan banyak pertanyaan tentang masa lalu ayahnya dan alasan keluarganya harus hidup jauh dari Indonesia. Saat menyelesaikan tugas akhirnya, Lintang memilih membuat film dokumenter tentang fakta-fakta yang terjadi setelah peristiwa 1965. Dari proses tersebut, Lintang mulai memahami bahwa banyak orang menjadi korban karena tuduhan politik dan ketakutan yang dibangun pada masa Orde Baru. Hal tersebut ditemukan pada kutipan novel *Pulang*, sebagai berikut.

Data 01

Membuat sebuah film dokumenter tentang sejarah tanah air ayahnya yang dikubur oleh pemerintahnya bukan saja pekerjaan berat tetapi juga akan menggerus akal sehat. Aku tak tahu bagaimana Lintang akan mendapatkan literatur yang lengkap tentang peristiwa September 1965 yang masih banyak menyimpan tanda tanya. (Chudori, 2012: 209).

Data tersebut ditunjukkan bentuk resistensi terhadap kekuasaan yang dimulai oleh Lintang dengan membuat film dokumenter pasca peristiwa 1965. Ia harus berhadapan dengan sejarah yang telah diputar balik oleh pemerintah Orde Baru. Lintang tidak hanya mencari data tetapi juga berhadapan dengan trauma, ingatan terpecah dan luka sejarah yang masih hidup di tengah masyarakat. Kutipan tersebut termasuk dalam resistensi kuasa karena secara tidak langsung Lintang melakukan perlawanan pada narasi sejarah resmi yang telah dibangun negara.

Negara tidak sekedar mengakui, namun harus pula mengungkapkan fakta-fakta mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965. Ini termasuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi kejadian-kejadian serta mengungkapkan kebenaran kepada publik,” tutur Usman. (Nur, 2023)

Data tersebut ditunjukkan sebagai resistensi kekuasaan yang terlihat melalui wawancara media *Tirto.id* (2023) dengan Direktur *Amnesty International* Indonesia Usman Hamid, menyampaikan bahwa jika negara tidak pernah memberikan permintaan maaf secara resmi atas pelanggaran HAM berat di masa lalu yang ditunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya mengakui kesalahannya. Ia juga menekankan bahwa permintaan maaf merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada para korban, termasuk para eksil korban peristiwa 1965. Selain itu, Usman menilai pemerintah memiliki kewajiban untuk membuka fakta sejarah yang sebenarnya, menjelaskan peristiwa yang terjadi, dan menyampaikan kebenaran kepada publik. Ia juga berpendapat bahwa para eksil

seharusnya mendapatkan kompensasi yang layak atas penderitaan yang mereka alami karena tidak bisa kembali ke Indonesia dalam waktu lama.

Data 02

Pencatatan sejarah di negeri ini sangat buruk. Ibu serius, kamu harus menuliskan ini semua 1965 yang berhasil direkam dan dicatat." agar suatu hari ada sisi lain dari korban atau survivor Tragedi 65 yang berhasil direkam dan dicatat. (Chudori, 2023: 164).

Data 03

Saya tahu betul ini masih peka karena selalu ada satu narasi yang ingin dipertahankan. Tetapi saya harus jujur, karena catatan sejarah kita sudah telanjur didominasi oleh pemerintah Orde Baru, maka hanya sejarawan dan masyarakat sipil yang bisa mencatatnya meski tak bisa langsung dipublikasikan, tetapi paling tidak kita bisa mencatatnya. (Chudori, 2023: 357).

Data yang terlampir ditunjukkan kritik terhadap pencatatan sejarah yang sangat buruk sehingga adanya usaha untuk melawan narasi sejarah yang selama ini hanya ditulis dari sudut pandang penguasa. Dalam novel *Namaku Alam*, tokoh Ibu Uma meminta agar pengalaman para korban dan penyintas tragedi 1965 tetap dicatat dan dituliskan. Hal ini ditunjukkan kesadaran bahwa sejarah yang beredar di masyarakat belum sepenuhnya mewakili suara para korban. Oleh sebab itu, pencatatan pengalaman korban menjadi bentuk resistensi terhadap kekuasaan yang selama ini mendominasi narasi sejarah resmi. Data tersebut diperlihatkan bahwa menulis dan merekam sejarah bukan sekadar kegiatan dokumentasi, melainkan juga bentuk perlawanan untuk menjaga agar suara para korban tetap hidup dan tidak terhapus dari ingatan kolektif.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemberitaan yang dimuat oleh *Suara.com* (2025), yang menekankan pentingnya pencatatan sejarah dari sudut pandang korban dan penyintas agar masyarakat dapat memahami bahwa peristiwa 1965 tidak hanya memiliki satu versi cerita sebagaimana yang selama ini diwariskan oleh negara. Hal ini terlihat dalam pernyataan Usman yang mengatakan, “Betapapun gelapnya sejarah, ia harus tetap ditulis meski berdampak terhadap tragedi kemanusiaan dan mengungkapkan kesalahan kebijakan negara di masa lalu.” (Tanjung & Hutasuht, 2025). Sejarah memang tidak bisa dipisahkan dari hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Usman juga menyampaikan bahwa jika sejarah tidak ditulis dan disampaikan secara jujur, banyak peristiwa penting bisa perlahan dilupakan oleh masyarakat. Hal itu bukan hanya menghilangkan ingatan tentang masa lalu, tetapi juga dapat melukai para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat yang selama

ini belum mendapatkan keadilan. Selain itu, manipulasi sejarah yang dilakukan dengan memilih-milih fakta tertentu juga dikhawatirkan dapat menghambat proses hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di masa lalu. Akibatnya, para korban dan keluarganya semakin sulit memperoleh keadilan karena kebenaran tentang peristiwa tersebut tidak pernah dibuka secara utuh kepada publik. Resistensi kekuasaan selanjutnya terlihat pada kutipan novel *Namaku Alam*, sebagai berikut.

Data 04

Terjadi pertentangan antara Yu Kenanga dan Yu Bulan dalam menanggapi usulku untuk melapor kepada polisi. Yu Kenanga menganggap polisi bukanlah solusi bagi keluarga tapol seperti keluarga kami. (Chudori, 2023: 106)

Data dalam novel *Namaku Alam* ditunjukkan bahwa keluarga tapol tidak memandang polisi sebagai tempat perlindungan, melainkan sebagai bagian dari kekuasaan negara yang pernah menindas mereka pada masa Orde Baru. Penolakan Yu Kenanga untuk melapor lahir dari rasa takut dan trauma yang sudah lama tertanam akibat pengawasan, diskriminasi, dan kecurigaan yang terus diterima keluarga tapol. Karena pengalaman itu, hukum dan aparat negara dianggap tidak selalu berpihak kepada mereka, sehingga melapor kepada polisi justru dirasa dapat membawa masalah baru. Respon Yu Kenanga ketidakpercayaan terhadap aparat negara dapat dilihat sebagai bentuk resistensi terhadap kekuasaan.

Resistensi tersebut tidak dilakukan dengan perlawanan besar, tetapi melalui sikap menolak dan tidak percaya kepada aparat negara. Sikap ini ditunjukkan bahwa kekuasaan Orde Baru tidak hanya bekerja melalui kekerasan, tetapi juga melalui rasa takut yang memengaruhi cara masyarakat berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, keputusan Yu Kenanga untuk tidak melapor menjadi cara dirinya melindungi keluarga dari kemungkinan buruk yang pernah mereka alami.

Satu batalion berisikan tentara bersenjata lengkap lalu mendesak keluarga Wahid untuk segera angkat kaki dari lahan tempat rumahnya berdiri. Tak ketinggalan, berdasarkan penuturan Wahid, tentara mengeluarkan ancaman apabila instruksi mereka tidak dipatuhi, maka cap "komunis" bakal ditempelkan ke masing-masing anggota keluarga yang tersisa. (Irfani, 2025).

Peristiwa 1965 meninggalkan trauma bagi banyak keluarga yang dituduh terlibat dengan kelompok komunis. Salah satu penyintas bernama Wahid menceritakan bahwa ayahnya ditangkap tentara tanpa proses hukum karena

dianggap dekat dengan kelompok komunis. Sejak saat itu, keluarganya hidup dalam ketakutan dan merasa tidak memiliki tempat untuk meminta perlindungan karena aparat negara justru menjadi sumber ancaman. Tidak lama kemudian, aparat desa dan tentara datang meminta dokumen tanah, tetapi dokumen tersebut tidak pernah dikembalikan dan keluarga Wahid dipaksa meninggalkan rumah mereka.

Tentara mengancam akan memberi cap komunis kepada seluruh anggota keluarga jika menolak perintah tersebut. Rumah dan kebun warga kemudian dihancurkan oleh tentara sehingga banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Kondisi tersebut memiliki persamaan dengan novel *Namaku Alam* karena sama-sama ditunjukkan rasa takut keluarga tapol terhadap aparat negara. Dalam kedua data tersebut ditunjukkan kritik terhadap aparat negara yakni polisi dan tentara yang dipandang bukan lagi sebagai pelindung, melainkan sumber ancaman akibat pengalaman perlakuan tidak adil pada masa Orde Baru. Bentuk resistensi terhadap kekuasaan selanjutnya terlihat dalam novel *Pulang* melalui keberanian masyarakat untuk menyuarakan tuntutan agar presiden pada masa pemerintahan Orde Baru mengundurkan diri. Hal tersebut tampak dalam kutipan sebagai berikut.

Data 05

"Meski ini adalah pekan kedua saya di Jakarta, saya memasuki era di mana masyarakat Indonesia sudah berani terang-terangan meminta presidennya untuk mundur." (Chudori, 2012: 410).

Data tersebut ditunjukkan bahwa masyarakat telah berani melawan kekuasaan yang selama ini menekan mereka. Keberanian untuk meminta presiden mundur secara terbuka merupakan bentuk dari resistensi kekuasaan terhadap dominasi pemerintah Orde Baru. Hal ini selaras dengan pandangan Michel Foucault yang menyebut ketika terdapat kekuasaan pasti ada resistensi. Melalui tokoh Lintang, novel *Pulang* diperlihatkan runtuhnya rasa takut membuat masyarakat mulai berani menyuarakan kritik terhadap pemerintah sebagai bentuk perlawanan.

"Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri," ujar Harmoko, 19 Mei 1998. (Elvina, 2021)

Bentuk resistensi kekuasaan terlihat dalam aksi ribuan mahasiswa dan masyarakat pada Mei 1998 mulai berani

turun ke jalan menentang pemerintahan Orde Baru. Melansir dari *KompasTV* (2021) demonstrasi itu tidak hanya menuntut perubahan sistem pemerintahan, tetapi juga mendesak presiden Soeharto untuk mundur dari jabatan dan meminta dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut mendapat dukungan dari sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam gerakan reformasi. Situasi semakin mengejutkan ketika pimpinan DPR/MPR melalui Harmoko secara terbuka meminta Soeharto mengundurkan diri, sebuah peristiwa yang kemudian menjadi titik penting dalam runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Dari sini terlihat bahwa resistensi muncul ketika masyarakat mulai sadar dan berani melawan sistem kekuasaan yang selama ini mengontrol kehidupan mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai ketidakadilan sosial para tokoh eksil politik dalam novel *Pulang* dan *Namaku Alam* karya Leila S. Chudori, digunakan teori relasi kuasa Michel Foucault yang mencakup tiga bentuk yaitu, relasi kuasa atas pikiran, relasi kuasa atas tubuh, dan resistensi kekuasaan. Ketiga bentuk relasi kuasa ini saling berkaitan dan diperlihatkan bagaimana kekuasaan negara tidak hanya bekerja secara represif, tetapi juga secara halus membentuk kesadaran dan pengalaman hidup para korban.

Relasi kuasa atas pikiran terlihat dari cara pemerintah membentuk pola berpikir masyarakat melalui stigma politik, pendidikan, manipulasi sejarah, hingga pelabelan terhadap orang-orang yang dianggap terkait PKI, seperti tokoh Segara Alam yang harus hidup dalam trauma dan bayang-bayang politik sepanjang hidupnya. Akibat trauma dan tekanan politik tersebut para tokoh eksil politik hidup dalam rasa takut yang berkepanjangan dan perlahan-lahan menerima narasi resmi negara sebagai kebenaran tunggal tanpa ruang untuk mempertanyakan atau melawan. Proses ini ditunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja bukan hanya melalui paksaan fisik, melainkan juga melalui pembentukan wacana yang mengendalikan pikiran dan ingatan kolektif masyarakat. Tokoh lain seperti, Lintang juga mulai menyadari bahwa selama ini sejarah yang ia dengar dan pelajari di bangku sekolah tidak sepenuhnya digambarkan realita yang dialami para korban eksil politik pasca-peristiwa 1965, sehingga muncul kesadaran kritis dalam dirinya untuk menelusuri kebenaran yang selama ini disembunyikan.

Relasi kuasa atas tubuh juga tampak jelas dalam kedua novel Leila S. Chudori melalui berbagai bentuk kontrol fisik, seperti penangkapan, perburuan, pengasingan, pencabutan paspor, pembatasan pekerjaan, hingga

pengawasan yang terus-menerus terhadap kehidupan para eksil politik beserta keluarga. Tubuh individu di sini menjadi objek kontrol negara, sebab kekuasaan menentukan siapa yang boleh hidup bebas dan siapa yang harus disingkirkan dari ruang sosial dan politik. Para tokoh dalam novel mengalami kehilangan hak sebagai warga negara, kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak, hingga hidup dalam keterasingan yang panjang akibat cap politik yang terus melekat pada diri mereka, seperti yang terlihat pada tokoh Dimas Suryo dan para eksil lainnya yang terpaksa menetap di negeri asing tanpa kejelasan status kewarganegaraan. Hal ini merupakan gambaran nyata dari relasi kuasa atas tubuh yang mampu mengontrol, membatasi, bahkan menghilangkan hak-hak individu yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara.

Sementara itu, resistensi kekuasaan terlihat melalui usaha para tokoh untuk melawan narasi tunggal yang dibentuk oleh negara. Lintang, misalnya, berusaha mencari dan merekam fakta sejarah dari sudut pandang korban tragedi 1965 melalui proses pembuatan film dokumenter agar pengalaman dan penderitaan mereka tidak hilang begitu saja ditelan waktu. Bentuk perlawanan juga tampak melalui keberanian mahasiswa dan masyarakat yang mulai menyuarakan kritik terhadap pemerintah Orde Baru, meskipun harus menghadapi risiko besar. Dari kedua novel tersebut dapat dipahami bahwa di tengah kuatnya kekuasaan yang menindas, selalu ada usaha dari individu maupun kelompok untuk mempertahankan kebenaran, ingatan, dan keadilan bagi para korban eksil politik.

DAFTAR RUJUKAN

- Affan, H. (2024). Hantu-Hantu “Toko Wong” dan Pembantaian Massal 1965-1966 di Bali – “Ratusan Orang Ditembak Senapan Mesin”. Dalam *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0lw671nwj5o>, diakses 28 Mei 2026.
- Ardiono, Ana, H., & Harijaty, E. (2019). Ketidakadilan Sosial dalam Novel *Pulang* Karya Leila S. Chudori (Tinjauan Sosiologi Sastra). *Bahasa dan Sastra*, (Online), Vol 4, Nomor 1. <https://bastra.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/701>, diakses 27 Mei 2026.
- BBC News. (2023). *Peristiwa 65: Mengapa Pernyataan Eksil bukan Pengkhianat Negara Diprotes dan Picu Kemarahan Sejumlah Eksil*. Dalam *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-6597968>, diakses 30 Juni 2026.

- Bonasir, R. (2023). Eksil Korban Peristiwa 1965: Apa Kaitan Mereka dengan Label PKI sehingga Tidak Diakui sebagai WNI?. Dalam *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-65387237>, diakses 28 Mei 2026.
- Chudori, L. S. (2012). *Pulang*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Chudori, L. S. (2023). *Namaku Alam*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Elvina, L. (2021). Sejarah 19 Mei 1998: Mahasiswa Menduduki Gedung DPR/MPR Tuntut Soeharto Mundur. Dalam *Kompas.com*. <https://www.kompas.tv/klik360/175315/sejarah-19-mei-1998-mahasiswa-menduduki-gedung-dpr-mpr-tuntut-soeharto-mundur>, diakses 28 Mei 2026.
- Foucault, M. (2017). *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/ Pengetahuan*. Pustaka Narasi.
- Irfani, F. (2025). Tentara Merampas Tanah Rakyat secara Sistematis saat Tragedi 1965– Dicap Komunis, Lahannya Dipakai Berbisnis. Dalam *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn43j9nxpg3o>, diakses 28 Mei 2026.
- Jo, H. (2018). Ketika DI/TII Memburu PKI. Dalam *Historia*. <https://www.historia.id/article/ketika-di-tii-memburu-pki-d8j2q>, diakses 28 Mei 2026.
- Jones, P., Bradbury, L., & Boutillier, S. Le. (2016). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Niam, S., & Setuningsih, M. (2023). Cerita Korban Eksil 1965, Dimaki “Tante Gerwani” oleh Tetangga di Jerman Gara-Gara Beda Pendapat. Dalam *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/30/05330011/cerita-korban-eksil-1965-dimaki-tante-gerwani-oleh-tetangga-di-jerman-gara>, diakses 28 Mei 2026.
- Nur, M. F. (2023). Eksil 65 Butuh Pengungkapan Kebenaran, Bukan Sekadar Urusan Visa. Dalam *Tirto.id*. <https://tirto.id/eksil-65-butuh-pengungkapan-kebenaran-bukan-sekadar-urusan-visa-gPxs>, diakses 28 Mei 2026.
- Parmin, J. (2016). *Pendekatan dalam Penelitian Sastra*. Prosiding: Seminar Nasional Sastra Indonesia (SENASI) 2 dengan tema “Sastra dan Industri Kreatif”. Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.
- Pradipta, A. D. (2014). Konflik Politik dalam Novel *Pulang* Karya Leila Salikha Chudori: Tinjauan Sosiologi Sastra dan Implementasinya Sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. (online). <https://eprints.ums.ac.id/29964/>, diakses 17 Juli 2025.
- Pribadi, I. T. (2018). Bersih Diri dan Bersih Lingkungan Gaya Orde Baru. Dalam *Tirto.id*. <https://tirto.id/bersih-diri-dan-bersih-lingkungan-gaya-orde-baru-cKdq>, diakses 28 Mei 2026.
- Rahmawati, A., Diarta, I. N., & Laksmi, A. R. (2022). Analisis Pendekatan Mimetik dalam Novel Trilogi Pingkan Melipat Jarak Karya Sapardi Djoko Damono dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Sastra. *JIPBSI Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. (online), Vol 4, Nomor 1, <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/jipbsi/index>, diakses 10 Juni 2026.
- Ridlo, M. (2020). Dituduh PKI dan Terusir, Puluhan Keluarga di Cilacap Menumpang di Tanah Tetangga. Dalam *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/regional/read/4370402/dituduh-pki-dan-terusir-puluhan-keluarga-di-cilacap-menumpang-di-tanah-tetangga?>, diakses 28 Mei 2026.
- Sholikhah, A. (2020). Relasi dan Resistensi Kuasa dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Kajian Kekuasaan Michel Foucault. *BAPALA*. (Online). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/34714>, diakses 17 Juli 2025.
- Sumarno, S. (2020). Analisis Isi dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra. *Edukasi Lingua Sastra*, (Online) Vol 18, Nomor 2, <https://doi.org/10.47637/elsa.v18i2.299>, diakses 9 Juni 2026.
- Tanjung, E., & Hutasuhut, Y. A. A. (2025). Penulisan Sejarah Baru: Pelanggaran HAM Dinegasikan, Soeharto Dijadikan Pahlawan?. Dalam *Suara.com*. <https://liks.suara.com/read/2025/06/05/213843/penulisan-sejarah-baru-pelanggaran-ham-dinegasikan-soeharto-dijadikan-pahlawan>, diakses 28 Mei 2026.